

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimasa sekarang ini fenomena dunia pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang belum efektif dalam menjalankan fungsinya. Padahal sekolah merupakan pilar utama dari sistem pendidikan nasional. Banyak sekolah mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya yang ditandai dari rendahnya mutu lulusan, pelayanan yang tidak memuaskan pelanggan pendidikan, dan kinerja guru rendah. Faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain adalah karena peran serta masyarakat kurang diberdayakan. Padahal pelaku penyelenggara sistem pendidikan di negeri ini sejak zaman sebelum kemerdekaan secara realitasnya bukan hanya pihak pemerintah saja melainkan juga melibatkan pihak masyarakat (Makmun 2001 : 43).

Program sekolah dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah untuk mengelola / memanaj anggotanya dan masyarakat dengan berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan sekolah atau tujuan pendidikan, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 4 ayat 6 UU Sisdiknas No. 20. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (2003 : 9).

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

Penguasaan pengetahuan tentang manajemen pendidikan dibutuhkan kepala sekolah mengingat fungsi kepala sekolah adalah menggerakkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan organisasi sekolah dan masyarakat setempat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kepala sekolah berhadapan dengan manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang berbeda-beda dan tidak terlalu patuh dengan instruksi. Menggerakkan sumberdaya manusia, memerlukan kiat-kiat khusus yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan kerja dan perbedaan individual dari sumber daya manusia yang ada. Agar kepala sekolah mampu merumuskan kiat-kiat khusus menggerakkan sumberdaya manusia, maka diperlukan strategi Manajemen Komite Sekolah dalam pemberdayaan dana pembelajaran sekolah.

Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan satu bentuk desentralisasi yang langsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. Jika Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pengarahannya, pemantauan dan penilaian, maka sekolah seharusnya diberikan peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini disebabkan karena proses interaksi edukatif sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan menggunakan komite sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat, dan dengan menerapkan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah pada tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten /kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Paradigma Manajemen Berbasis Sekolah beranggapan bahwa jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi pendidikan adalah demokratisasi, partisipasi dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru dan masyarakat adalah pelaku utama terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkat mikro harus dihasilkan dari interaksi dari ketiga pihak tersebut. Masyarakat sebagai stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar/penyandang dana pendidikan baik langsung melalui uang sekolah (uang komite sekolah) maupun tak langsung melalui pajak, sehingga sekolah seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Intensitas yang disebut sebagai “masyarakat” itu sangat kompleks dan tak terbatas (*boderless*), sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah, maka konsep masyarakat itu perlu disederhanakan (*simplified*) agar menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu. Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui “perwakilan” fungsi *stakeholder*, dengan jalan membentuk komite sekolah pada setiap sekolah. Komite sekolah sedapat mungkin dapat mempresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara sekolah dengan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan komite sekolah.

Sebagaimana tujuan pembentukan komite sekolah dalam Ditjen (2003:16) adalah untuk :

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan disatuan pendidikan ;
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Namun pada pelaksanaannya, ternyata peran komite sekolah masih jauh dan bahkan cenderung menyimpang dari konsep yang sebenarnya. Komite sekolah yang seharusnya mendorong sekolah dalam upaya peningkatan mutu malah cenderung merasa sebagai penguasa di sekolah. Selain itu ada komite sekolah yang hanya merupakan simbol saja dan lebih mengutamakan kepentingan kepala sekolah. Menurut ICW (2004) bahwa personil komite sekolah dipilih orang-orang yang merupakan kroni dari kepala sekolah, sehingga komite sekolah tidak efektif dalam melakukan perannya. Bahkan menurut Sukri (2004) bahwa keberadaan komite sekolah di berbagai sekolah sangat rendah kualitasnya sehingga perlu mendapat pembinaan dari pihak yang berkompeten, atau jelasnya komite sekolah perlu disekolahkan lagi. Yang dikemukakan oleh ICW maupun Sukri, mungkin ada benarnya, namun apakah juga di SMP Negeri 3 Sunggal juga terjadi hal demikian. Jawabannya belum tentu. Dasar inilah yang menjadi peneliti berkeinginan meneliti untuk mengetahui sejauh mana kebenaran hal tersebut, khususnya di SMP Negeri 3 Sunggal. Adapun inti permasalahan penelitian ini dirangkum dalam fokus permasalahan melalui pertanyaan penelitian berikut ini.

B. Pertanyaan Penelitian

Secara umum permasalahan penelitian ini difokuskan pada strategi manajemen komite sekolah dalam pemberdayaan dana pembelajaran di SMP Negeri 3 Sunggal. Permasalahan tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang kemudian dijadikan acuan dalam penelitian :

1. Bagaimana manajemen sekolah memberdayakan Komite Sekolah dalam pemberdayaan dana pembelajaran ?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam menghimpun dana untuk kelancaran proses pembelajaran ?
3. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam menetapkan strategi pengelolaan (management) dana pembelajaran ?
4. Bagaimana implementasi kebijakan Komite Sekolah dalam penggunaan dana oleh Kepala Sekolah ?
5. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas Komite Sekolah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen sekolah memberdayakan Komite Sekolah dalam pemberdayaan dana pembelajaran ?
2. Untuk mengkaji upaya-upaya Komite Sekolah dalam menghimpun dana untuk kelancaran pembelajaran
3. Untuk mengetahui peran Komite Sekolah dalam menentukan strategi manajemen sekolah dalam memberdayakan dana pembelajaran.
4. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Komite Sekolah tentang dana sekolah oleh Kepala Sekolah.
5. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas Komite Sekolah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis bahan masukan bagi Kepala Sekolah-Kepala Sekolah dalam pemberdayaan Komite Sekolah.
2. Pedoman (acuan) bagi Stakeholder yang dipercayakan sebagai mewakili masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Secara teoretis dapat dijadikan bahan bagi peneliti-peneliti lain yang berhubungan dengan masalah pendidikan, terutama dalam bidang keilmuan manajemen pendidikan .

